



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG STRATEGI DAN KERJASAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD NOVIAN
2. Jabatan : DIREKTUR HUKUM DAN REGULASI
3. NHK : 156598

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.520.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/300 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 380.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 183.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. 22.712.125

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 23.663.289

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.129.375.414

III. HUTANG Rp. 1.412.462.460

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.716.912.954

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.